



## PDIP Janji Tetap Kritis

**JAKARTA** - Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta berjanji akan tetap kritis pada kebijakan yang akan dikeluarkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meskipun yang bersangkutan dipilih langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan PDIP memberi dua opsi untuk Heru. Pilihan pertama, Heru akan didukung kuat jika menjalankan program yang menyentuh kepentingan rakyat. Kedua, Heru akan dikritik keras jika program yang dijalankan tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. "Kritis itu keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene pilihan Presiden kemudian Fraksi PDIP bungkam, itu enggak juga," ujar Gembong kemarin.

Menurut dia, sikap kritis ini untuk menepis sikap PDIP yang bakal melempem karena Heru merupakan pilihan Jokowi yang juga merupakan kader PDIP. Diketahui, sejak Pemprov DKI Jakarta dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, partai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI ini kerap mengkritik kebijakan Anies.

Namun, Gembong tetap memberikan selamat kepada Heru yang telah dipercaya Presiden Jokowi dalam mengemban amanat menjadi penjabat gubernur DKI. Hal yang harus diingat, banyak tugas berat yang perlu diselesaikan. Gembong menjelaskan, pekerjaan rumah pertama Heru ketika sudah dilantik menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta adalah menata birokrasi.

Heru sebagai "komandan baru" di Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan pasukan untuk menuntaskan masalah Jakarta. "Setelah itu dilakukan, koordinasi dengan instansi samping, itu menjadi penting. Koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda, dengan DPRD penting. Kenapa penting? Itu sebagai fondasi melakukan percepatan eksekusi terhadap program yang ke depan akan dijalankan oleh Pak Heru," ulasnya.

Gembong kemudian bicara program prioritas yang mesti

dikerjakan Heru. Program-program itu mulai dari penanganan banjir, penyediaan air bersih, hingga masalah kemacetan di Jakarta. "Yang kita harapkan pertama adalah Pak Heru bisa memprioritaskan penanganan persoalan banjir yang selama lima tahun tidak dikerjakan oleh Pak Anies. Kedua, bagaimana menambah jaringan air bersih agar warga Ibu Kota bisa terjangkau air bersih. Pelayanan air bersih Jakarta itu kan penting. Itu kan kebutuhan pokok. Ketiga soal kemacetan. Keempat soal perumahan dan banyak lagi," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

Gembong menyebut Heru didukung penuh semua fraksi di DPRD DKI Jakarta karena pengalamannya sebagai wali kota Jakarta Utara, pejabat Pemprov DKI Jakarta, dan Kasetpres. Dia yakin Heru bisa mengeksekusi program-program prioritas tersebut. "Dengan berbekal tiga pengalaman itu, harapan kita Pak Heru mampu sebagai penjabat untuk melakukan percepatan proses pembangunan Jakarta agar pembangunan Jakarta bisa segera dinikmati oleh warga Ibu Kota," harapnya.

Sidang tim penilai akhir (TPA) memutuskan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. Sidang TPA tersebut dipimpin langsung Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2022. Heru terpilih mengalahkan dua kandidat lain, yakni Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Sejauh ini Heru enggan berkomentar banyak terkait keterpilihannya sebagai pengganti Anies Baswedan. Heru meminta agar masyarakat bersabar. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga meminta masyarakat me-

nunggu hingga saatnya pelantikan. "Tunggu pengesahan atau pelantikan ya baru bisa *comment* (komentar)," kilahnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur DKI. Anies menilai Heru sebagai sosok berpengalaman. "Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi penjabat di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik," katanya.

Anies menyebut Presiden Jokowi telah mengambil keputusan dengan sejumlah pertimbangan dan berbagai faktor dalam menunjuk penjabat gubernur DKI. "Kami percaya Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta," ujarnya.

Anies yang akan selesai masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 menaruh rasa hormat kepada proses yang berlangsung. Dia bersyukur sosok Heru telah berpengalaman di Jakarta. "Jadi saya menaruh rasa hormat pada proses yang berlangsung dan kita semua bersyukur bahwa yang akan bertugas adalah orang yang sudah mengetahui Jakarta," tuturnya.

### Kapasitas Heru Sudah Teruji

Pengamat hukum kebijakan publik, Peri Umar Farouk, mengatakan, Jakarta merupakan titik pemberangkatan sebelum Heru melenggang ke kancas nasional sebagai kepala Sekretariat Presiden. "Kembalinya Heru ke Jakarta adalah bukti kapasitasnya sudah teruji dalam penatalaksanaan daerah yang memiliki kekhususan ini," katanya.

Dalam hal penetapan Heru menjadi penjabat gubernur, lanjut Peri, Presiden Jokowi telah melakukan kajian dan analisis sehingga Heru dianggap mampu menghadapi spektrum yang cukup luas di Jakarta. Selama tiga tahun ke depan Peri yakin Heru akan bekerja secara lurus serta tidak berpihak pada kepentingan kelompok atau individu tertentu. "Kami melihat



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

## PDIP Janji Tetap Kritis

adanya konsistensi dan integritas yang beliau miliki dalam menjalankan tugas sejak berkarier di Jakarta sampai pada posisi strategisnya di Istana Presiden," ujarnya.

Peri menilai keputusan Presiden menunjuk Heru sangat tepat lantaran dia mempunyai pengalaman selama berdinastikan di Pemprov DKI dan di Istana Negara. Sejak 1993 hingga saat ini Heru dianggap telah banyak melakukan terobosan. "Heru sudah teruji dengan berbagai dinamika di Jakarta. Banyak sekali terobosan yang dilakukan, dari pengelolaan SDM, perencanaan pembangunan, atau efektivitas birokrasi," ucapnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan bahwa pelantikan pejabat gubernur DKI Jakarta akan diselenggarakan sesuai turunya surat keputusan (SK). SK tersebut berisi keterangan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

pada 16 Oktober 2022 mendatang. "Ya nanti kita lihat SK-nya. Jadi nanti kita lihat SK-nya, karena akhir masa jabatan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur kan 16 Oktober," ujarnya.

Benny menyebut bahwa idealnya pejabat gubernur DKI Jakarta dilantik di hari terakhir Anies Baswedan menjabat yakni pada 16 Oktober. "Nah, idealnya (pelantikan) kan di hari akhir masa jabatan itu. Tapi, kita

lihat SK-nya nanti. Kalau memang memungkinkan (jd dilantik) di hari yang sama atau sehari setelah itu," ungkapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur DKI. Riza

menyebut, Heru orang lama di Jakarta. "Saya tentu mengucapkan selamat siapa pun yang dipilih Pak Presiden, Pak Mendagri, kami dengar informasinya Pak Heru. Selamat ya," kata pria yang biasa disapa Ariza itu.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan Heru merupakan orang lama di Jakarta dan paham seluk-beluk Ibu Kota. "Dia orang lama di sini saya yakin di bawah kepemimpinan beliau DKI Jakarta bisa berjalan lebih baik lagi untuk meneruskan program-program yang ada. Selamat buat Pak Heru dan semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Selamat," imbuhnya.

Ariza juga menilai Heru mengerti dan memahami masalah-masalah di Jakarta. Dia yakin sosok Heru bisa mengemban amanat dengan baik sebagai penjabat gubernur. "Pak Heru orang lama dan sudah mengerti dan memahami semuanya," tuturnya.

**tim.sindonews**



### HERU BUDI HARTONO

#### Riwayat Pendidikan

- SDN 8 Jakarta Pusat dan 3 tahun menjadi siswa SD di Pakistan (1971 s/d 1977)
- SMP PSKD 1 Jakarta Pusat (1977 s/d 1981)
- SLTA Kerajaan Belanda (Den Haag) (1981 s/d 1984)
- Meraih gelar S1 di Universitas Krisnadwipayana - Jakarta (1984 s/d 1990)
- Meraih Gelar S2 di Universitas Krisnadwipayana - Jakarta (1995 s/d 1998)

#### Riwayat Jabatan

- Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993)
- Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995)
- Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999)
- Kasubag Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara (2002)
- Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007)
- Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotawati Kota Jakarta Utara (2008)
- Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013)
- Wali kota Jakarta Utara (2014)
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015)
- Kepala Sekretariat Presiden RI (2017)
- Pj Gubernur DKI Jakarta